



KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LUTFI RAUF**

Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada Tahun 2019 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, Januari 2019

PIHAK KEDUA,

WIRANTO

PIHAK PERTAMA,

LUTFI RAUF

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
1. Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerja Sama Luar Negeri Indonesia;	a. Jumlah Kerja Sama Bilateral dan Regional Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Negara Lain yang Ditindaklanjuti dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia	7
	b. Jumlah Rekomendasi terkait sinkronisasi, sinergi dan pengendalian Kerja Sama Multilateral dan Organisasi Internasional dalam Mendukung Suksesnya Diplomasi Indonesia.	2
	c. Jumlah Penanganan Permasalahan Bidang Politik Luar Negeri	2
	d. Jumlah Implementasi <i>Blueprint APSC 2025</i> ;	5
2. Terwujudnya Daya Dukung Manajemen Unit Organisasi yang Berkualitas;	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja	75
	b. Indeks Kepuasan Pelayanan Kesekretariatan (Skala Likert 1-5)	4

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Politik Luar Negeri Rp. 11.850.000.000,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Jakarta, Januari 2019

Menko Polhukam



WIRANTO

**Deputi Bidang Koordinasi Politik
Luar Negeri**



LUTFI RAUF